

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**



**20
22**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2022. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Metode dan teknik penyusunan LAKIP ini berpedoman pada Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kinerja dan realisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerjamaupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Polewali, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS,



H. AZWAR JASIN, S. Sos., M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19730711 199203 1 001

DAFTAR ISI

1	BAB I PENDAHULUAN
2	Latar Belakang
	KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
13	BAB II PERENCANAAN KINERJA
15	A. RENCANA STRATEGIS
	B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022
17	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
42	A. AKUNTABILITAS KINERJA
	B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
46	BAB IV PENUTUP
	A. KESIMPULAN
	B. LANGKAH PERBAIKAN KEDEPAN
	LAMPIRAN
	-Perjanjian Kinerja Tahun 2022
	-Pengukuran Kinerja Tahun 2022
	-Realisasi Anggaran Tahun 2022

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan Misi Organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas sekretariat daerah merupakan perwujudan kewajiban sekretariat daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi sekretariat daerah. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal yang sama. Guna mendorong Good Governance dikalangan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut atas aturan tersebut.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berintikan pada pemberian otonomi secara penuh kepada daerah dalam menyelenggarakan berbagai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota telah diawali dengan penataan organisasi pemerintahan kabupaten dengan membentuk Badan, Dinas dan kantor.

2. Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab.Polewali Mandar sebagai Pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasasarn Program yang wajib dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Sosial 2019-2024 dan dokumen penetapan kinerja

Tujuan :

- a. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kab.Polewali Mandar untuk meningkatkan kinerjanya.

3. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum Penyusunan Laporan AKIP ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- f. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- g. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015-2025
- i. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 tahun 2012 tentang Indikator kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
- j. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.
- k. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- l. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 50 tahun 2017 tentang kedudukan, organisasi tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas sosial Kabupaten Polewali Mandar.

B. Kedudukan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang sosial dan kesejahteraan sosial;
- b. Penyusunan rencana dan program dibidang sosial dan kesejahteraan sosial;

- c. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang sosial, dan kesejahteraan sosial;
- d. Pelayanan umum dibidang sosial dan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Tugas pokok dan fungsi

	Tugas pokok dan fungsi
Jabatan	Kepala Dinas
Tugas Pokok	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dinas.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan rencana kerja di Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan Menetapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi perumusan di Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan b. Menetapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi koordinasi di Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja c. Menetapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan d. mengevaluasi pembinaan di Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan e. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas. f. Membuat laporan pelaksanaan fungsi dan tugasnya. g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
Jabatan	Sekretaris
Tugas Pokok	merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas yang meliputi penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, urusan ketatausahaan serta urusan keuangan dan perlengkapan
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan program yang meliputi: penyusunan program dan anggaran; b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan yang meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat; c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan yang meliputi: urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut (laporan hasil pemeriksaan) dan perlengkapan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi
Jabatan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas yang meliputi : melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga dan protokol, surat-menyurat, kearsipan, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol serta surat menyurat; b. Pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi;

	<ul style="list-style-type: none"> c. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan; d. Pelaksanaan urusan perlengkapan; e. Pelaksanaan urusan kepegawaian; f. Pengelolaan dan pelaksanaan urusan umum lainnya.
Jabatan	Sub bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas sekretariat, khususnya mengakomodir penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaporan dan khususnya dalam pengelolaan administrasi keuangan dan verifikasi terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dengan bidang lain dalam lingkungan dinas; b. Pelaksanaan pelaporan anggaran baik anggaran rutin maupun kegiatan; c. Penyusunan laporan terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan; d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang anggaran; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran; g. Penyusunan laporan hasil verifikasi terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan; h. Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas termasuk penyusunan neraca keuangan dinas; i. Pengelolaan administrasi keuangan lainnya; j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi
Jabatan	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang pemberdayaan sosial, dan penanganan Fakir Miskin.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin; b. Penyusunan rencana dan program dibidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin; c. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin; d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi.
Jabatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, bantuan Stimulan dan Penanganan Fakir Miskin
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang pemberdayaan sosial, Bantuan Stimulan dan Penangan Fakir Miskin
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan penanganan fakir miskin; b. Penyusunan Rencana Kerja teknis dan operasional pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan Fakir Miskin; c. Pengendalian pelaksanaan bimbingan sosial pemberdayaan sosial dan pelayanan sosial bagi masyarakat di lingkungan kumuh;

	d. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan keluarga, KAT; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi
Jabatan	Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan,member petunjuk, member tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial, khususnya dibidang kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
Fungsi	a. Menyimpan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Jabatan	
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, khususnya dibidang bina kelembagaan sosial.
Fungsi	a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang bina kelembagaan sosial; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang bina kelembagaan sosial meliputi: karang taruna, bina kube dan lembaga sosial lainnya; c. Penyusunan laporan pelaksanaan program dibidang bina kelembagaan sosial meliputi; karang taruna, bina kube dan lembaga sosial lainnya; d. Pelaksanaan bimbingan teknis program dibidang bina kelembagaan sosial meliputi; karang taruna, bina kube dan lembaga sosial lainnya Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi
Jabatan	a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang perlindungan dan jaminan sosial.
Fungsi	a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perlindungan dan jaminan sosial; b. Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi bantuan, advokasi sosial dan bantuan hukum; c. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan jaminan sosial dalam bentuk asuransi/bantuan langsung berkelanjutan pada; fakir miskin, anak yatim piatu , terlantar, lansia dan penyandang cacat serta penderita penyakit kronis; d. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang perlindungan dan jaminan sosial ; e. Penyusunan laporan kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.
Jabatan	e. Kepala Seksi Perlindungan Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas

	bidang perlindungan dan jaminan sosial, khususnya dibidang perlindungan sosial.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perlindungan sosial; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang bantuan sosial bencana alam; c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang bantuan sosial bencana alam; d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang bantuan sosial bencana alam; <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.</p>
Jabatan	Kepala Seksi Jaminan Sosial
Tugas Pokok	f. Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang bantuan dan jaminan sosial, khususnya dibidang jaminan kesejahteraan sosial.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang jaminan kesejahteraan sosial; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang jaminan kesejahteraan sosial; c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang jaminan kesejahteraan sosial; d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang jaminan kesejahteraan sosial; <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p>
Jabatan	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang Rehabilitasi sosial.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang Rehabilitasi Sosial; b. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan Rehabilitasi Sosial; c. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang Rehabilitasi sosial ; d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang Rehabilitasi sosial; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Jabatan	Kepala Seksi Lansia dan Anak
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas seksi Sosial, Lansia dan Anak.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan petunjuk teknis Rehabilitasi Sosial, Lansia dan Anak; b. Penyusunan Rencana Kerja Teknis dan Operasional pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Anak; c. Pengendalian data dan sistem informasi kesejahteraan sosial anak dan lansia; d. Pengendalian pelayanan rehabilitasi sosial anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak viabilitas dan berkebutuhan khusus; e. Pengendalian pelayanan Rehabilitasi Sosial pengangkatan Calon Orang Tua (COTA) dan Calon Anak Angkat (COA); f. Pengendalian Rehabilitasi sosial lansia, meliputi kelembagaan, perlindungan dan akseptabilitas dan pelayanan sosial di dalam dan diluar panti; g. Pengendalian dan koordinasi teknis rehabilitasi sosial anak

	<p>dan lansia Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p>
Jabatan	Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas seksi Tuna Sosial, Disabilitas dan panti
Fungsi	<p>a. Penyusunan petunjuk teknis Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan panti; b. Penyusunan Rencana Kerja Teknis dan Operasional pelaksanaan Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti; c. Pengendalian data dan sistem informasi kesejahteraan sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, korban perdagangan orang; d. Pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial dan bekas warga binaan; e. Pengendalian pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza; f. Pengendalian Rehabilitasi sosial lansia, meliputi kelembagaan, perlindungan dan akseptabilitas dan pelayanan sosial di dalam dan diluar panti; g. Pengendalian dan koordinasi teknis rehabilitasi sosial anak dan lansia</p> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p>

Sumber Daya SKPD

Pegawai pada Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar terdiri dari:

Tabel 2. 1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon/Pejabat

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	2	2	4
3.	IV	5	5	10
4.	Staf	5	3	8
Jumlah		13	11	23

Tabel 2. 2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	-	-	0
2.	II	0	1	1
3.	III	8	10	18
4.	IV	3	1	4
Jumlah		11	12	23

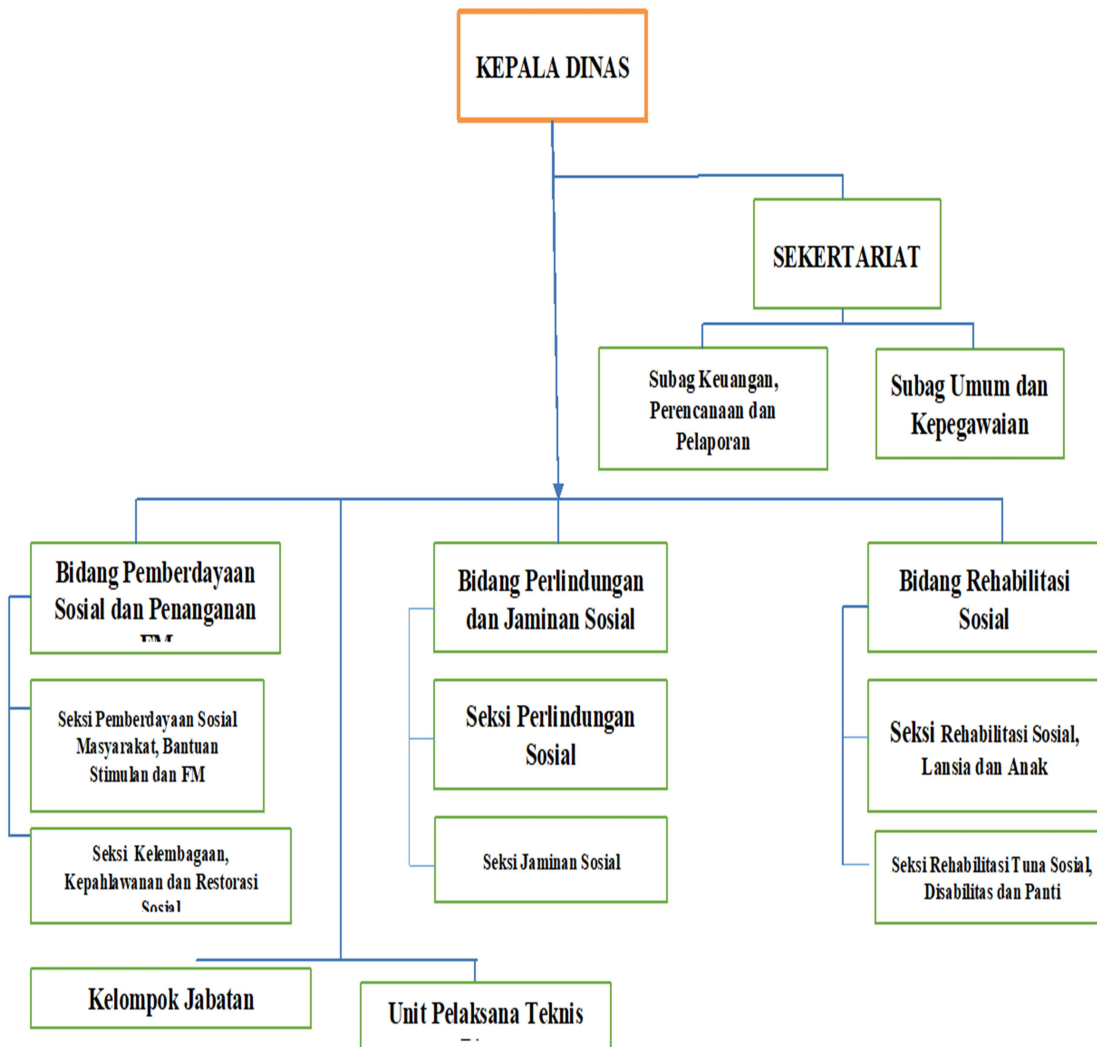
Tabel 2. 3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	0	-	0
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	2	1	3
4.	Sarjana Muda	0	0	0
5.	Strata 1 (S1)	8	11	19
6.	Strata 2 (S2)	3	-	3
Jumlah		13	12	25

Gambaran Umum SKPD

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 50 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang sosial yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah.

STRUKTUR DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR



Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dilanjutkan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 31 dan Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu Dinas Tekhnis yang cukup padat dengan tanggung jawab yang besar dimana didalamnya ada 3 (tiga) bidang yang harus dikoordinasikan dengan baik agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun setiap awal tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar merupakan pelaksana pemerintah kabupaten di bidang Sosial dimana Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Sosial yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah.

Oleh karena itu dalam Penyusunan LAKIP ini tentu diawali dengan proses penyusunan rencana strategi, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja. Adapun pedoman penyusunan LAKIP, mengacu pada Peraturan Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Isu-isu Strategis yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial adalah :

1. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana
3. Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial
4. Peran SKPD lain kurang, terkait penanganan pemberdayaan kesejahteraan sosial
5. Belum adanya kerjasama penanganan masalah kesejahteraan sosial
6. Tidak memiliki sarana prasarana pelayanan sosial
7. Belum optimalnya potensi dari sumber dari kesejahteraan sosial
8. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar.

9. Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum pernah tertangani.
10. Belum adanya tempat untuk menampung dan memberikan rehabilitasi hasil razia.
11. Masih kurangnya kesadaran dari penyandang masalah kesejahteraan tentang permasalahan yang dihadapi sehingga sering terjadi penolakan terhadap pelatihan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk PMKS.
12. Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.
13. Belum adanya sarana barak penampungan hasil razia PMKS terutama untuk lansia terlantar dan gelandangan pengemis.
14. Terbatasnya tenaga terlatih di bidang kesejahteraan sosial yang terampil dalam menangani PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di lapangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019–2024 serta dijadikan acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar. Rencana strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tahapan proses disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan setiap potensi maupun peluang yang ada serta hambatan yang mungkin akan timbul. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, target, kebijakan, program serta pengukuran tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

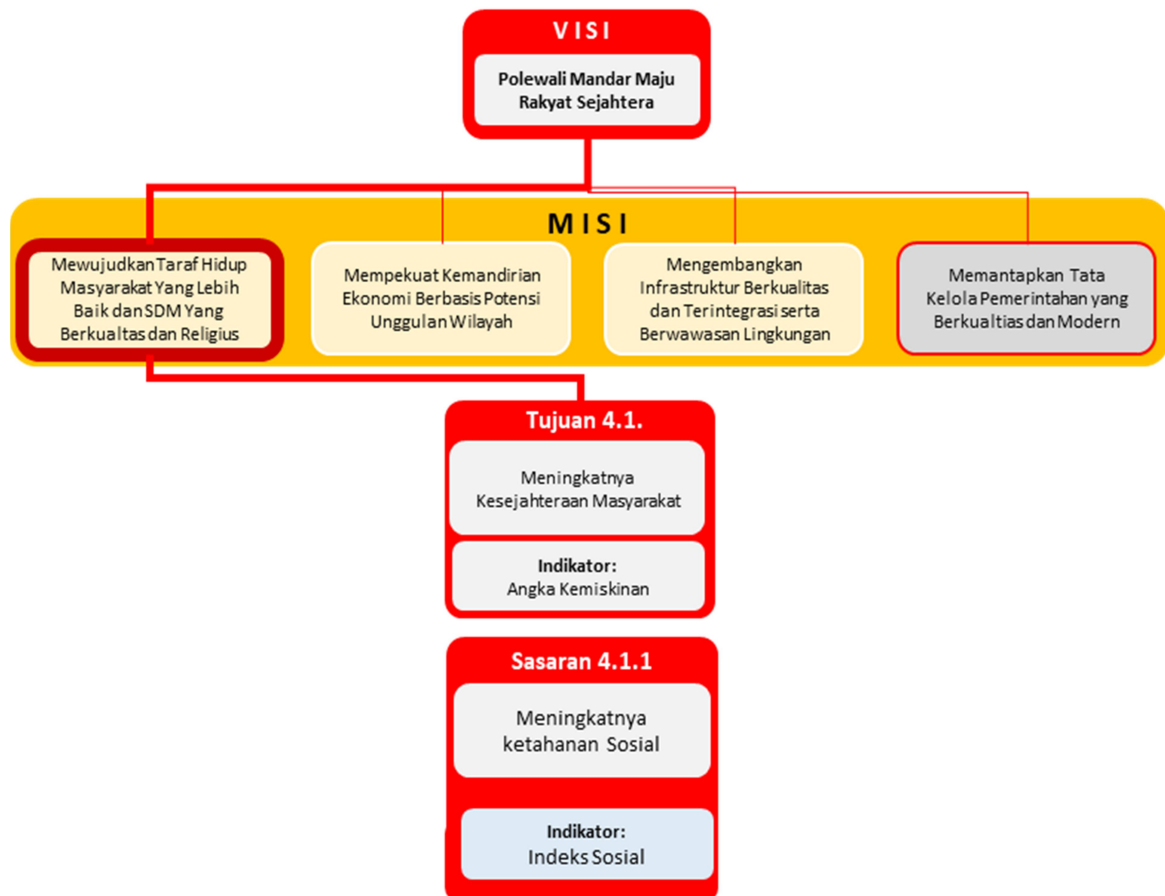
Dalam rangka menunjang pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, dengan Visi Daerah *"Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera"*, yang akan dicapai melalui misi sebagai berikut :

Dimana visi tersebut dijabarkan menjadi 4 (empat) misi ;

1. Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang lebih baik dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan religius;
2. Memperkuat Kemandirian Ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah;
3. Mengembangkan Infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
4. Memantapkan tata kelola Pemerintahan yang berkualitas dan modern.

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar sebagai Leading Sector Pembangunan Kesejahteraan Sosial level Kabupaten masuk dalam misi 1 (satu) yaitu **"Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius"**.

**Tabel Kolerasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Dinas Sosial Kab.Polewali Mandar**



Keterkaitan Misi dan Tujuan

Sebagaimana visi dan Misi diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial mendukung pencapaian misi pertama **“Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius”**. selaras dengan Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar hingga tahun 2024 adalah Meningkatkan **Taraf Hidup Masyarakat** yang akan diukur melalui Indeks Gini Ratio Penduduk Miskin. Ditargetkan pada tahun 2024 Indeks Gini Ratio 0,321 tujuan tersebut tentu bisa dicapai dengan meningkatkan status kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan strategi

Untuk mencapai tujuan, Sasaran, Strategi sebagaimana tertuang dalam Renstra 2019-2024 maka yang menjadi sasaran adalah Penanganan

Masalah Kesejahteraan Sosial sedangkan sasaran strategi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan adalah antara lain;

- a. Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi;
- b. Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi PMKS Non Potensial dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana;
- c. Meningkatnya Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan.
- d. Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran;
- e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
- f. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 adalah sebagai berikut;

- a. Target Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar periode 2022 berdasarkan capaian sasaran strategis ;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	TARGET 2022
1	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	1	44.78
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	Sangat Baik
3	Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial	1	33,00%
4	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensi	Persentase masyarakat miskin potensi yang memiliki ketahanan sosial	1	21,00%
5	Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial	1	71,00%
6	Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	1	100%
7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	3	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah		100.00%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah		Sangat Baik

b. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan. Hal ini penting karena memberikan arah hasil yang akan dituju. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Perjanjian Kinerja ini sekaligus merupakan Indikator Kinerja Kunci, Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2022 sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2022
1	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	44.78
			Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial	33,00 %
			Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensi	Persentase masyarakat miskin potensi yang memiliki ketahanan sosial	21,00%
			Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial	71,00%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik
			Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	100%
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A
				Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100.00%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar selaku pengemban amanah di bidang sosial melaksanakan kewajiban ber-akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2019-2024 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dan dari hasil Pengukuran Kinerja tahun 2022 Indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur Pengukuran Keberhasilan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dapat dinyatakan Indikator sangat berhasil dan Berhasil yaitu pada indikator 5,6 dan 7 terkategori sangat baik.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	KATEGORI
1	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	44,78%	43,67%	Baik
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial	33,00%	37,00%	Baik
4	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensi	Persentase masyarakat miskin potensi yang memiliki ketahanan sosial	21,00%	13,00%	Cukup Baik
5	Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial	71,00%	81,00%	Sangat Baik
6	Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	100%	100%	Sangat Baik
7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A	A	Sangat Baik

		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100.00%	100.00%	Sangat Baik
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Keterangan : 0 sd 50 % = cukup baik, 50 s.d 100 % =Baik, > 100% Sangat Baik

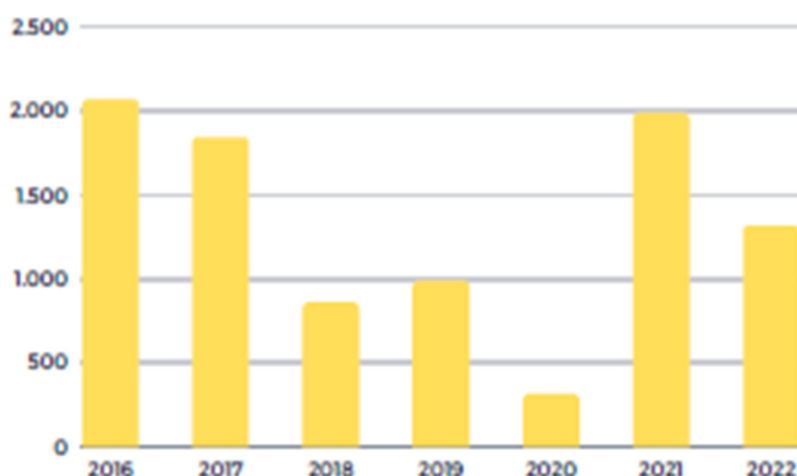
$$\text{indeks Ketahanan Sosial} = \frac{\text{persentase Capaian (Rehabilitasi Sosial + Pemberdayaan Sosial + Perlindungan dan Jaminan Sosial)}}{3} \times 100\%$$

$$= \frac{37 + 13 + 81}{3} \times 100\%$$

$$= \mathbf{43,67\% \text{ (capaian tahun 2022)}}$$

STATISTIK CAPAIAN PENANGANAN PPKS

2016 - 2022



STATISTIK 2016-2022

dari grafik capaian penanganan PPKS yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar cenderung fluktuatif. hal ini sangat dipengaruhi oleh alokasi besaran Pagu yang dikelola, terendah di tahun 2020 (310) akibat refocusing anggaran dampak covid-19 dan tertinggi di tahun 2016 (2062) dan 2021 (1982)

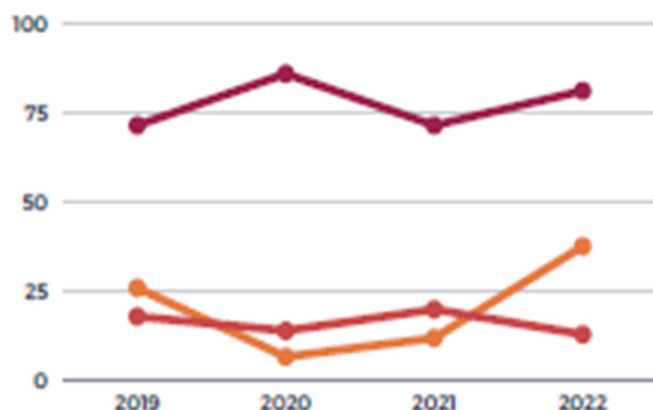
CAPAIAN 2019-2022

target capaian pada sasaran strategis tertinggi pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan terendah di Bidang Pemberdayaan Sosial

KESIMPULAN

Pagu Anggaran yang SANGAT TERBATAS adalah faktor yang paling berpengaruh dalam pencapaian setiap indikator Sasaran strategis, Kualitas SDM Pelaksana beserta kuantitasnya menjadi faktor pendukung pencapaian target prioritas di masa yang akan datang

- Rehabilitasi Sosial
- Pemberdayaan Sosial
- Perlindungan dan jaminan Sosial



44,78

Target Capaian Indeks Sosial
tahun 2022

43,67

Realisasi Capaian Indeks Sosial
tahun 2022

TUJUAN 1

MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022
1.	Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial	33.00

Dinas Sosial, indikator sasaran merupakan komposit dari indikator Kinerja Program. Ditahun 2022 target output disetiap kegiatan telah dimaksimalkan pencapaiannya , program, kegiatan maupun sub kegiatan yang ada di Bidang rehabilitasi Sosial ini diharapkan mampu memperkuat peran Dinas Sosial khususnya dalam penanganan Kelompok Rentan Lansia dan Anak serta Disabilitas, hal ini merupakan amanat **SPM WAJIB** bidang Sosial . Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS yang seharusnya rangkaian sub kegiatan Penjangkauan, Advokasi lalu Pelayanan kemudian Tahap Rehabilitasi belum mampu dilaksanakan sepenuhnya. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi PMKS hanya mampu diimplementasikan berupa layanan sosial bagi Anak dalam Panti berupa penyediaan bantuan permakanan bagi Anak Terlantar. Panti yang mampu di beri layanan sosial dilakukan diluar Panti yang sebelumnya dilakukan bagi anak yg berada di dalam panti, hal ini akibat diberlakukannya/terbitnya permendagri Nomor 90 tahun 2019 dengan sasaran sejumlah 16 (10 orang pada APBD Pokok dan 6 anak pada kegiatan PMK penangana Dampak Inflasi). Serta 29 orang Lansia (20 orang di APBD pokok dan 9 orang PMK) juga di intervensi pula 25 orang disabilitas Sedangkan kegiatan Bimbingan Keterampilan lanjutan Pasca Rehabilitasi Sosial dikhususkan bagi PMKS terkategori Penyandang Disabilitas berupa Assesment dan intervensi tahap awal ditargetkan sejumlah 15 orang ditahun 2022 dapat menjangkau sekitar 129 orang. Kelompok PMKS Disabilitas ini membutuhkan penanganan khusus dan lengkap agar yang bersangkutan dapat mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain.

mengingat pentingnya Program ini adalah salah satu penyumbang terbesar pencapaian SPM di Dinas Sosial, namun dalam perkembangannya Bidang ini belum maksimal dalam menyajikan Kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan indikator Pencapaian SPM, Keterlantaran Kelompok Masyarakat Rentan yang mencakup

Lanjut Usia Terlantar dan Anak Terlantar yang masih sangat minim dalam Penjangkauan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk memacu pencapaian pada sasaran strategis dimasa yang akan datang adalah;

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Kurangnya kapasitas / Kapabilitas pelaksana Rehabilitasi
2. Layanan Pusat Rehabilitasi di tingkat Kabupaten belum ada
3. Ketersediaan Petugas yang berkompeten(Ahli psikologi) sangat sulit dilakukan mengingat keterbatasan anggaran
4. Belum tersedianya data yang tervalidasi yang mencakup total jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan layanan dan Rehabilitasi Sosial

SOLUSI

1. Penyelarasan pandangan antar pelaksana / Penyedia Layanan dan Rehabilitasi Sosial tentang bagaimana Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial yang layak seharusnya dilaksanakan;
2. Penyediaan Pusat Rehabilitasi Sosial di tingkat Kabupaten
3. yang diharapkan menjangkau Kelompok Rentan khususnya di pelayanan tingkat awal terhadap masalah sosial;
4. Peningkatan Pagu Anggaran.

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

- a. Ketersediaan SDM seperti PKSAI (Pekerja Sosial Anak) sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja Program/Kegiatan. Sikap profesionalisme dan pengabdian tanpa pamrih mendampingi anak yang bermasalah dengan hukum sangat diapresiasi;
- b. Networking yang terbangun memudahkan penjangkauan bagi PMKS rentan, masyarakat yg mulai aktif serta peduli akan keadaan lingkungan sekitar sangat membantu penanganan kasus kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{182.482.800}{186.267.800} \times 100\% \\
 &= 100\% - 97.96\% \\
 &= 2.00\%
 \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis I ini sebesar 2.00% secara teory minim dari segi efisiensi.

No	Sasaran strategis OPD	Indikator Sasaran Renstra	Tahun		Target	Realisasi
			2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi	Persentase Penanganan Masalah sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan	26.00%	6.73%	33.00%	37.08%

Persentase Penanganan Masalah Sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan tahun 2022 diperoleh dengan rumus sebagai berikut ;

Dan ditahun 2022 jumlah PMKS yang ditangani untuk mendapatkan hasil dari persentase tersebut adalah 85 orang, yaitu jumlah Anak Panti yang ditangani dan memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 26 jiwa Lanjut Usia, 16 Anak, 15 Kelompok Rentan dan 25 jiwa Disabilitas.

Sasaran Strategis 1 (satu) yaitu **Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi** ini terdiri atas 1 (satu) Program pendukung yaitu Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Untuk meningkatkan capaian pada Sasaran

Strategis ini Program ini adalah salah satu penyumbang terbesar pencapaian SPM di Dinas Sosial, namun dalam perkembangannya Bidang ini belum maksimal dalam menyajikan

antaranya adalah Pelayanan dan Rehabilitasi bagi kelompok masyarakat rentan termasuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar serta Disabilitas.

$$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Rentan ditangani yang diberi Pelayanan dan Rehabilitasi}}{\text{Jumlah Total Masyarakat Rentan yang seharusnya ditangani}} \times 100\%$$

$$\frac{85}{226} \times 100\%$$

$$= 37.08\%$$

Capaian Output Kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial							
Kegiatan / Sub Kegiatan	TAHUN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	0 orang	0 orang	0 orang	50 orang	0 orang	55 orang	25 orang
Penyediaan Permakanan	115 jiwa	18 jiwa	78 jiwa	42 jiwa	25 jiwa	90 jiwa	60 jiwa

Tabel 3.2
Capaian Program / Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	70 orang	70 orang	130.691.300	130.669.400	99.98
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	15 orang	15 orang	56.576.500	51.823.400	93.25

Serba-serbi SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

TARGET CAPAIAN

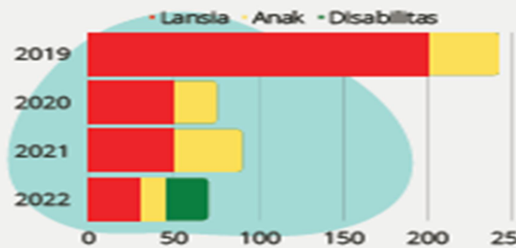
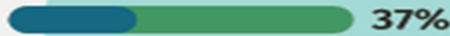
2022 : 33.00%

sesuai Permensos No.09 Tahun 2018 tentang **STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) WAJIB BIDANG SOSIAL** terdiri atas : 85orang =20lansia + 10 anak + 15 kelompok rentan +BTT 9 lansia + 6 anak +25 disabilitas, di bagi 226 (371-145 capaian 2021)



Data Perbandingan

adanya capaian yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu di 2021 sebesar 12.00%



37%

Perbandingan Capaian sasaran dengan Total PPKS Rentan kelompok Lansia, Anak dan Disabilitas

capaian kinerja output kegiatan yang sangat fluktuatif / sangat tergantung pada alokasi Pagu Anggaran yg tersedia

Dokumentasi



SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022
2.	Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial	71,00

No	Sasaran strategis OPD	Indikator Sasaran Renstra	Tahun		Target	Realisasi
			2020	2021	2022	
2	Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial	71.43%	85.86%	71,00%	81,00%

Tabel Capaian Sasaran strategis 2 tahun 2016-2022

Capaian Output Kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial								
Program/Kegiatan sesuai Permen 13	TAHUN				Permen 90 tahun 2019	TAHUN		
	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
Penanggulangan Tanggap Darurat (Distribusi Logistik) Korban Bencana	189 jiwa	100 jiwa	502 jiwa	87 jiwa	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :	174 jiwa	514 jiwa	150 Paket
Verifikasi dan Updating Basis Data Terpadu (BDT)	0	0	32.000 KM	32.000 KM		32.000 KM	87.814 KM	71.048 KM (150 KK Bantuan Logistik Bencana+228 RTLH +71.025 KK data Penerima Bansos yg diverifikasi)
Pemantauan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	11431 KPM	17313 KPM	31131 KPM	28273 KPM		20.099 KPM		
Pemantauan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rastra	37.213 KM	36.079 KM	36.079 KM	36.079 KM		36.079 KM		
Bantuan Jaminan Permakanan (Kebutuhan Dasar) bagi Lansia Terlantar dan Kelompok Rentan lainnya)	60 jiwa	0	100 jiwa	200 jiwa		0		

Persentase Masyarakat miskin yang masuk dalam cakupan Penjaminan Sosial serta Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang mendapatkan bantuan Logistik masuk dalam indikator ini dan bila dilihat dari tahun ke tahun 2020 s.d 2022 jumlahnya mengalami penurunan, mengingat data yg diverifikasi di tahun 2022 juga menurun jumlahnya sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 81,00%.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah Total Warga Miskin yang seharusnya menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100\%$$

$$\frac{71.204}{87.814} \times 100\%$$

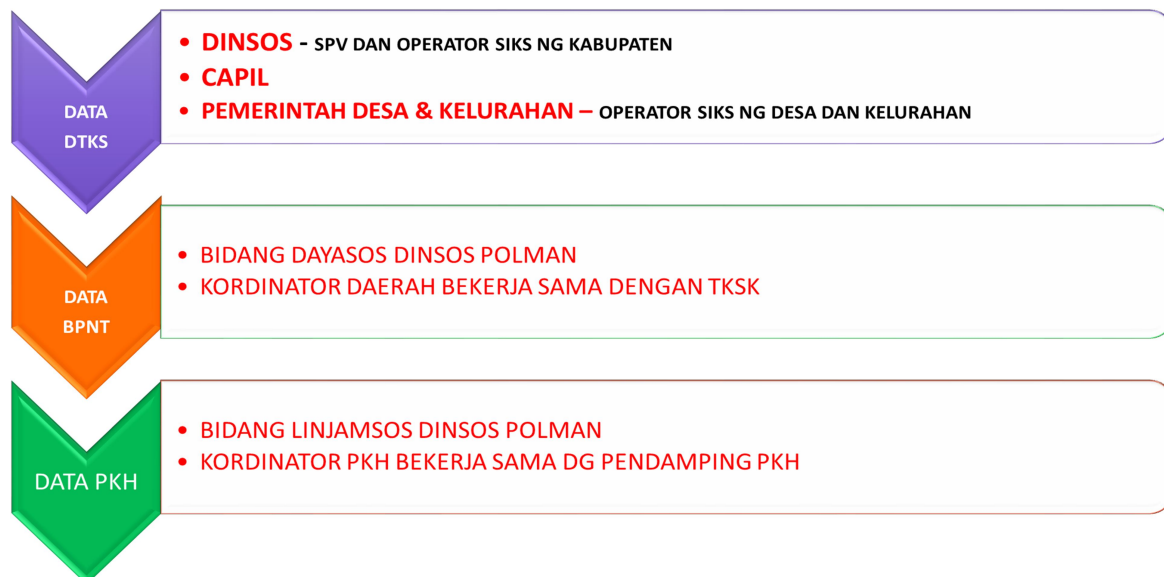
$$= 81.00 \%$$

Dinas Sosial khususnya yang berada dibawah koordinasi seksi Perlindungan Sosial. Pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Updating Basis Data Terpadu (BDT) melalui aplikasi SIKS-NG yang menyasar 40% Masyarakat dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah diharapkan mampu menyaring Data Layak dan Tidak Layak atau lebih familiar dengan istilah Inclusion dan Exclusion Error, aplikasi ini berupa menu isian pemutakhiran yang mencakup data keluarga Miskin, Data Anggota Keluarga, Pekerjaan serta data yang bersifat pribadi lainnya. Plus berisi jenis Program Bantuan yang diterima.

Pengelolaan system Jaminan Sosial juga tercakup di sub kegiatan Pengelolaan data kemiskinan tingkat Kabupaten/Kota, seiring dengan indikator Persentase Masyarakat Miskin Penerima Penjaminan Sosial. Dan ditahun 2022 target capaian yang ditetapkan adalah 71.00% seiring dengan dilaksanakannya verifikasi data kependudukan melalui basis data Nomor Induk kependudukan (NIK) bagi masyarakat yang masuk dalam Data Tingkat Kesejahteraan Sosial (DTKS) Hal ini menjadi prestasi tersendiri bagi pengelolaan data kesejahteraan sosial se-Kabupaten Polewali Mandar baik di level Provinsi maupun capaian di level Nasional.

The screenshot shows the SIKS-NG web application interface. The top navigation bar includes the date 'Sabtu, 23 Oktober 2021', the user role 'Supervisor Kabupaten/Kota', and the location 'PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR'. The left sidebar contains a menu with options like 'Beranda', 'DTKS', 'Perbaikan NIK', and 'Monitoring NIK'. The main content area displays a table with the following data:

NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN	DATA YANG HARUS DIPERBAIKI	DATA YANG SUDAH DIPERBAIKI					PROSENTAS#	DATA BELUM DIPERBAIKI
			PADAN DUKCAPIL	BELUM PADAN DUKCAPIL	MENINGGA	DIUSULKAN HAPUS	TIDAK MEMPUNYAI E-KTP		
SULAWESI BARAT	MAMUJU UTARA	21,023	5,173	303	40	224	4	27.32%	15,279
SULAWESI BARAT	MAMUJU	41,924	10,378	972	42	1,013	110	29.85%	29,409
SULAWESI BARAT	MAMASA	54,176	16,625	6,240	43	744	45	43.74%	30,479
SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH	17,594	6,384	2,885	3	322	35	54.73%	7,965
SULAWESI BARAT	MAJENE	46,091	23,887	2,373	90	2,667	17	62.99%	17,057
SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR	103,403	59,860	13,325	369	29,682	147	100%	0



Program PKH dan BPNT adalah merupakan Program andalan Pemerintah yang diharapkan mampu menahan laju pertumbuhan angka kemiskinan dan merupakan Program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, dimasa Pandemi dimana Pemerintah pusat menyalurkan berbagai mode Paket Bantuan yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat terdampak pandemic Program ini menyasar Penduduk Miskin yang Datanya terangkum dalam Basis Data Terpadu (BDT) 28.099 KPM merupakan penerima PKH dan sekitar 42.707 KM adalah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial dari Program ini diambil dari APBN sedangkan operasionalnya didapat dari sharing Dana APBD Kabupaten Polewali Mandar. Kendala pelaksanaan kegiatan ini biasanya bersifat teknis operasional yang sangat berpengaruh pada pemutakhiran besaran bantuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ditahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar di amanahkan untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah tidak layak huni (RUTILAHU). Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membantu masyarakat kurang mampu mewujudkan Rumah layak baik dari segi dimensi kemasyarakatan maupun dimensi sosial.

RUTILAHU menyasar penduduk dengan tingkat kesejahteraan sosial rendah dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan, hal ini dilakukan sebagai bentuk guarantee akan tepat sasaran, layak atau tidaknya masyarakat sasaran mendapatkan bantuan sosial rehab RUTILAHU ini, berdasar pada verifikasi dan validasi kelayakan sejumlah 228 Rumah Tangga dinyatakan layak untuk menerima dan menjadi peserta Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni.

Adapun prasyarat yg dimaksud terangkum sebagai berikut;

- a. merupakan warga Kabupaten Polewali Mandar sesuai identitas kependudukan
- b. Masyarakat berpenghasilan rendah dan masuk pada basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);
- c. Menempati lokasi yang tidak dalam status sengketa dibuktikan dengan surat keterangan dari desa kelurahan
- d. Memiliki satu-satunya Rumah yang merupakan rumah yang akan di rehabilitasi
- e. Belum pernah mendapat bantuan program yang sejenis dengan RTLH

Berikut adalah tabel capaian persentase untuk Sasaran strategis kedua;

Tabel 3.3

Capaian Program / Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	74.740 KM 228 RTLH	87.814 KM	Rp.3.939.566.000	Rp.3.938.253.900	99,97
2.	Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana	Penyediaan Makanan	150 Paket (bantuan logistic bencana)	150Paket	Rp.89.143.400	89.073.400	99,87

Kegiatan Penanggulangan Bencana berupa Penyaluran Logistik bagi Korban Bencana baik Bencana Alam maupun Bencana Sosial, kesiapsiagaan dalam rangka Tanggap Darurat adalah hal mutlak, Dengan pengaktifan satuan siaga bencana (TAGANA) adalah salah satu upayanya. Dengan adanya TAGANA diharapkan resiko dan korban akibat bencana dapat diminimalisir, terkait kegiatan ini Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar juga berkoordinasi aktif dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat. Pendataan dan penyalurannya dilaksanakan langsung oleh personil TAGANA dan personil Pekerja Sosial lainnya .

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Tingginya angka jumlah Masyarakat Miskin yang belum tercover Penjaminan Kesehatan
2. Belum tersedianya Data Valid Jumlah PMKS yang layak mendapatkan penjaminan Sosial
3. Masih adanya Tumpang Tindih perihal kewenangan Pengelolaan Logistik Bencana
4. Filtering Data Penerima Bantuan Sosial seperti Rastra dan PKH masih belum maksimal sehingga Data ganda masih didapati
5. Jumlah Eksklusion dan Inclusion Error Penerima PKH masih tinggi

SOLUSI

1. Disarankan untuk melaksanakan koordinasi yg lebih intens kepada pihak Pemerintah Desa agar Validitas data yg akan menjadi dasar pengelolaan data di tingkat desa bisa lebih berkualitas.
2. Percepatan Verifikasi Validasi Data Kesejahteraan Sosial melalui Aplikasi SIKS-NG perlu segera dilaksanakan
3. Maksimalisasi pelaksanaan Graduasi Mandiri kepesertaan PKH
4. Konsolidasi periodik bagi seluruh pendamping lapangan yang menangani Penyaluran Bantuan Sosial mutlak diperlukan

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Indikator pada level impact dan Outcome pada Sasaran Strategis ini umumnya bersifat Fisik (besaran Bantuan kepada masyarakat) serta populasi Data dan Penyaluran Logistik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multipihak yang terkait dalam upaya Penjaminan Sosial akan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya .
2. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2022 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\begin{aligned} \text{Persentase efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \\ 100\% - &= \frac{4.028.759.400}{4.027.327.300} \times 100\% \\ &= 100\% - 99.96\% \\ &= 3.00\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis II ini sebesar 3.00% secara teory masih sangat minim dari segi efisiensi.

SERBA SERBI

SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya ketahanan sosial
masyarakat miskin potensial

"TARGET 2022"



"REALISASI 2022"

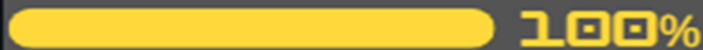


"71048 = 70520 + 684 JIWA
RTLH = 71204/ DATA

KELUARGA MISKIN DIBAGI
87.814 DATA KKM YG TELAH
DIVERIFIKASI DI TAHUN
2021

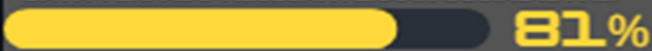
JUMLAH RTLH 228 UNIT

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI



DATA PENERIMA BANSOS YG
DIVERIFIKASI

PENERIMA PKH
BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022
3.	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial	Persentase masyarakat miskin potensial yang memiliki ketahanan sosial	21.00

No	Sasaran strategis OPD	Indikator Sasaran Renstra	Tahun		Target	Realisasi
			2020	2021	2022	
3	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial	Persentase Rata-rata Masyarakat Miskin Mandiri Persentase Lembaga Sosial pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	18.79%	14.28%	21.00%	13.00%

Tabel Capaian Sasaran startegis 3 tahun 2020-2022

$$\begin{array}{r}
 \text{Jumlah Warga Miskin} \\
 \text{Potensial yg difasilitasi} \\
 \hline
 \text{Jumlah Total Warga Miskin} \\
 \text{yang Potensial seharusnya} \\
 \text{ditangani} \\
 \hline
 \end{array}
 \times 100\%
 = \frac{766}{5910} \times 100\%
 = 13.00\%$$

Tabel 3.4
Capaian Program / Bidang Pemberdayaan FM dan Kelembagaan Sosial Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3		5	6	7	8
1.	Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	376 orang	15.276.600	15.241.400	99,77
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	330 orang + 60 orang Peksos yg dilatih	702.502.400	202.370.500	28,81

Program Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin adalah Program yang menysasar PMKS terkategori Produktif / masih bisa diberdayakan yang mengalami ketidak berdayaan akibat terganggunya fungsi sosial baik oleh lingkungan, keterpencilan wilayah maupun karena yang bersangkutan memang tidak memiliki fasilitas yang mampu mendukung yang bersangkutan untuk bisa menjadi produktif. Contohnya masyarakat terpencil yang akibat wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat ekonomi sehingga mengakibatkan kelompok masyarakat ini termarginalkan, meskipun pada dasarnya mereka memiliki potensi yang besar jika difasilitasi. Kegiatan Pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Polewali Mandar berada di Desa Ratte Kecamatan Bulu. Ditahun 2022 ditargetkan 1000 jiwa dalam komunitas tersebut memperoleh bantuan kegiatan pemberdayaan, sebenarnya akibat Pandemi kegiatan ini sangat sulit dilaksanakan namun dengan adanya dukungan Dana pusat melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Sosial akhirnya kegiatan Pemberdayaan/Pembinaan masyarakat masih bias dilaksanakan. Sedangkan bagi Keluarga Miskin Potensial serta Lansia Potensial yang diberdayakan dengan kegiatan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan penyediaan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)ditahun 2022 menjadi salah satu kegiatan yang mengalami refocusing, sejatinya kegiatan ini diharapkan mampu dijalankan dengan metode Bantuan Stimulan sehingga keberlanjutan kegiatan Pemberdayaan tersebut dapat betul betul efektif. Capaian Sasaran strategis Program Pemberdayaan Sosial ditahun 2022 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya (tahun 2021). Ditahun 2021 capaian mencapai 14.28% 20.00% yang ditargetkan, sedangkan ditahun 2022 naik ke angka 13.00% rendahnya capaian disebabkan tidak dilaksanakannya penyaluran Bantuan stimulant yang bersumber dari APBD Perubahan senilai Rp.500.000.000 atau sekitar 50 kelompok KUBE keputusan

tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut disebabkan singkatnya rentang waktu efektif pelaksanaan kegiatan yang idealnya dimulai dari tahapan verifikasi proposal-validasi lapangan – pengajuan paket pelelangan Barang jasa melalui Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) sehingga rawan menimbulkan kesalahan administrasi yang tentunya akan menyebabkan kesalahan procedural dalam penyaluran bantuan stimulan KUBE. faktor yang juga mempengaruhi adalah bahwa kegiatan di Program ini tidak cukup mendukung pencapaian SPM dinas Sosial (tidak masuk dalam indikator) capaian SPM. Langkah-langkah yang dianggap perlu untuk segera dilaksanakan agar capaian di sasaran ini semakin meningkat adalah antara lain;

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Rendahnya kesadaran Masyarakat Miskin tentang pentingnya Bantuan Stimulan digulirkan secara terus menerus
2. Belum jelasnya Regulasi Pengalihan kewenangan Penerbitan Rekomendasi BPJS dimasa yang akan datang
3. Jumlah Keluarga Miskin yang layak memperoleh Bantuan Stimulan masih sangat tinggi dan terkonsentrasi di wilayah Pesisir
4. Akses ke lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) masih sangat minim baik itu akses Jalan maupaun Akses Telekomunikasi
5. Pembinaan berkelanjutan belum dilaksanakan khususnya bagi Keluarga Miskin yang telah menerima bantuan stimulan

SOLUSI

1. Pembinaan berupa Pendampingan kepada Masyarakat / Keluarga Miskin perihal pentingnya kemandirian secara ekonomi lebih di intensifkan
2. Penyaluran Bantuan di wilayah pesisir tempat terkonsentrasinya kantong-kantong kemiskinan untuk lebih diintensifkan
3. Regenerasi Pekerja Sosial khususnya TKSK segera dilakukan mengingat perkembangan masalah sosial di lapangan yang semakin beragam
4. Validasi Data PMKS khususnya bagi PMKS Potensial mutlak segera dilakukan agar tidak ada lagi salah sasaran penerima bantuan sosial

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Indikator Outcome pada Program Pemberdayaan Sosial umumnya bersifat bantuan stimulant / bantuan Pemberdayaan, sementara kegiatan yang dilaksanakan terbatas sebagian besar berupa kunjungan serta monev pelaksanaan pengawasan khususnya bantuan yg dilaksanakan ditahun sebelumnya, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sementara list proposal calon penerima bantuan semakin bertambah sehingga solusi alternative yg dinilai mampu menyelesaikan persoalan ini adalah pengajuan proposal ke kementerian sosial melalui dana Dekonsentrasi yg melekat di Provinsi atau melekat di Program Nasional seperti PKH.

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 100\% - &= \frac{121.432.700}{124.999.600} \times 100\% \\ &= 100\% - 97.15\% \\ &= 2.85\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis III ini sebesar 2.85% secara teory masih sangat minim dari segi efisiensi.

SERBA SERBI

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial

sasaran strategis 3 ini menyoar kelompok PPKS Potensial seperti Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT), Keluarga Miskin Potensial yang memiliki usaha serta peningkatan kapasitas bagi PSKS khususnya Pekerja Sosial yg terlibat langsung dalam usaha Kesejahteraan Sosial



TARGET 2022



REALISASI 2022



TUJUAN 2

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
4	Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	100%

Tabel Capaian Sasaran startegis 4 tahun 2020-2022

No	Sasaran strategis OPD	Indikator Sasaran Renstra	Tahun		Target	Realisasi
			2020	2021	2022	
4	Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	25.00%	100%	100%	100%

$$= \frac{\text{Jumlah Lembaga/Wahana Kesos yang dibina}}{\text{Jumlah Total Jenis Lembaga Sosial yang seharusnya dibina dalam 1 tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\%$$

	100%								
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--



Tabel 3.5

Capaian Program / Bidang Pemberdayaan FM dan Kelembagaan Sosial Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3		5	6	7	8
1.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kewenangan Kab/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kewenangan Kab/Kota	2 lokasi	10.996.900	10.996.900	100

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Luasnya areal yang harus dijaga kondisinya pada setiap pelaksanaan upacara/peringatan hari besar;
2. Kurangnya kepedulian masyarakat sekitar serta kepedulian pemerintah setempat dalam menjaga situs/tempat bersejarah yang berada di wilayahnya
3. Intervensi pihak provinsi dan Pusat yang dinilai belum cukup berperan serta dalam membantu pelestarian situs/ tempat bersejarah

SOLUSI

Adanya sinergi antar stakeholder masyarakat dan Pemerintah dalam ikut menjaga kelestarian situs/tempat bersejarah, pengenalan kepada generasi muda tentang arti penting semangat keperintisan dan kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial yang menjadi modal dasar keberlangsungan semangat nilai-nilai nasionalisme yang seharusnya tertanam sedari dini

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Indikator Outcome pada Program Pemberdayaan Sosial umumnya bersifat bantuan stimulant / bantuan Pemberdayaan, sementara kegiatan yang dilaksanakan terbatas sebagian besar berupa kunjungan serta monitoring pelaksanaan pengawasan khususnya bantuan yang dilaksanakan ditahun sebelumnya, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sementara list proposal calon penerima bantuan semakin bertambah sehingga solusi alternative yang dinilai mampu menyelesaikan persoalan ini adalah pengajuan proposal ke kementerian sosial melalui dana Dekonsentrasi yang melekat di Provinsi atau melekat di Program Nasional seperti PKH.

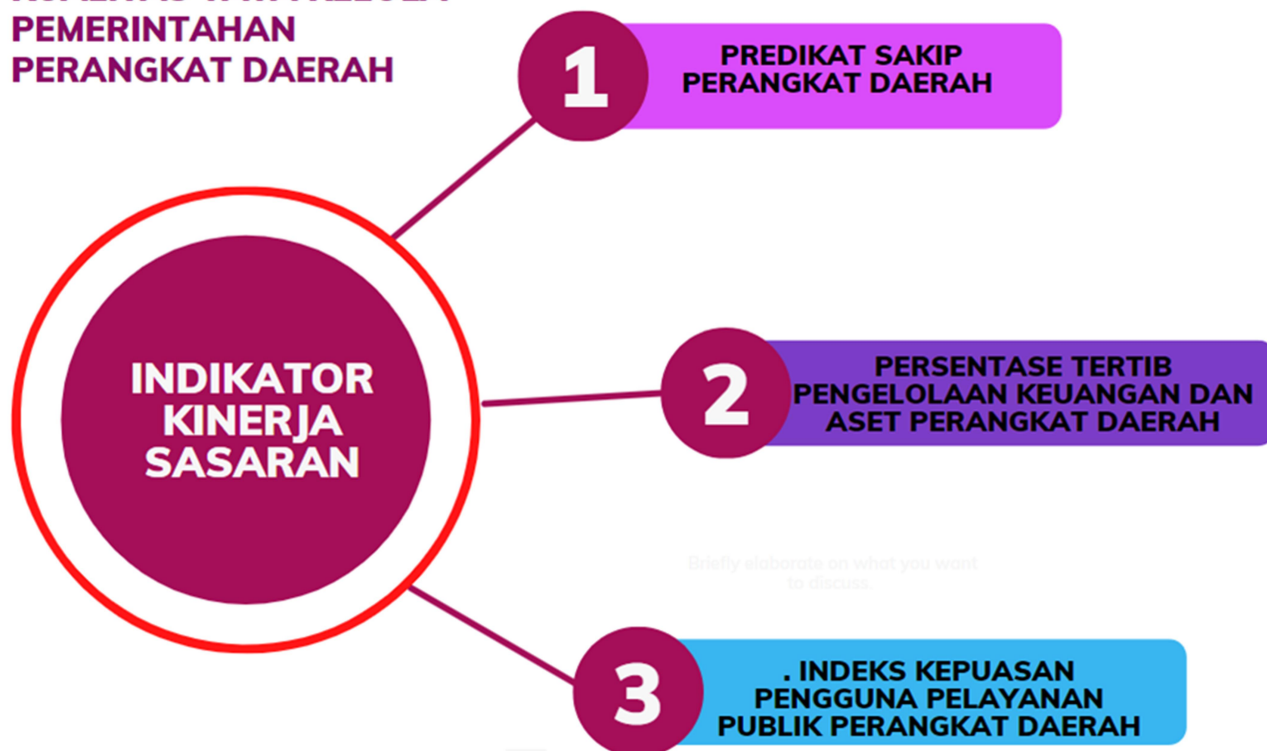
ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 100\% &= \frac{10.996.900}{10.996.900} \times 100\% \\ &= 100\% - 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis IV ini sebesar 0.00% secara teori masih sangat efektif dalam hal efisiensi.

**MENINGKATNYA
KUALITAS TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
PERANGKAT DAERAH**



SASARAN STRATEGIS 5 Indikator 1

Predikat SAKIP perangkat daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	1. Predikat SAKIP Perangkat Daerah 2. Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah 3. Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	A 95,56% Sangat Baik	100% Sangat Baik

Adapun Realisasi untuk ke 3 (tiga) Program diatas mencapai 93.14 % (termasuk gaji) angka ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran untuk Program ini sangat maksimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Di tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar mendapat predikat BB dari Inspektorat daerah Kabupaten Polewali Mandar , Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

	Komponen Yang Dinilai	2021		2020	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	29.10	30	29,10
b.	Pengukuran Kinerja	25	20.94	25	20.94
c.	Pelaporan Kinerja	15	9.27	15	9,00
d.	Evaluasi Internal	10	4.49	10	4,12
e.	Capaian Kinerja	20	12.00	20	12,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75.80	100	75,16
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		B

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang di evaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar memperoleh nilai **75,80** atau memperoleh predikat rating "**BB**". Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut,

Tabel 3.7

Program/Kegiatan yang mendukung **Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% Rp.	SISA
			K	Rp.	K	Rp.		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP perangkat daerah; opini PKPD; IKM						
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dok. Perencanaan perangkat daerah yg disusun sesuai standar dan tepat wkt	4	12,068,000	4	12,068,000	100.00	-

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok. Kinerja yg dihasilkan	1	6,449,600	1	6,449,600	100.00	-
--	-----------------------------------	---	-----------	---	-----------	--------	---

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Rendahnya kesadaran internal lingkungan Dinas Sosial tentang arti pentingnya penerapan akuntabilitas kinerja pada setiap kerja kerja yang dilaksanakan
2. Kurangnya sosialisasi tentang penerapan akuntabilitas kinerja serta komponen penilaian yang melekat didalamnya

SOLUSI

Peningkatan sosialisasi/pemahaman kepada seluruh ASN lingkup Dinas Sosial tentang arti penting Peningkatan kapasitas kerja serta kualitas kinerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta memberikan motivasi kerja melalui punishment and reward kepada setiap ASN yg berkinerja baik.

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 100\% &= \frac{12.068.000}{12.068.000} \times 100\% \\ &= 100\% - 100\% \\ &= 1.00\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di indikator 1 ini sebesar 0% secara teory sangat efisien.

Indikator 2

Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

Tabel 3.8

Program/Kegiatan yang mendukung **Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah**

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% Rp.	SISA
			K	Rp.	K	Rp.		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP perangkat daerah; opini PKPD; IKM						
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PNS perangkat daerah yg berkinerja baik	100	2,310,694,611	100	2,110,886,473	91.35	199,808,138
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS	25	2,305,260,511	100	2,105,452,573	91.33	199,807,938
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jmh Dok. LK akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	1	5,434,100	1	5,433,900	100.00	200
JUMLAH				2,310,694,611		2,110,886,473	91.35	199,808,138

Mendasari Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI Perwakilan Sulawesi Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 yang terbit di tanggal 20 Mei 2022 dengan Nomor : 10.A/LHP/XIX.MAM/05/2022, Kabupaten Polewali Mandar berhasil mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang mencakup pada Realisasi Anggaran, Perubahan, saldo anggaran lebih, arus kas serta perubahan ekuitas. Kabupaten Polewali Mandar mendapat predikat WTP 6 (enam) tahun berturut-turut dimulai 2016 s.d 2021 Adapun Program yang mendukung pencapaian tersebut adalah Program Peningkatan tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan besaran Realisasi 100% adalah sebagai berikut;

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih rendahnya pengetahuan keilmuan tentang akuntabilitas keuangan yang benar
2. Penerapan Akuntabilitas Keuangan di setiap kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat umum / belum menyeluruh

SOLUSI

Upaya Peningkatan kapasitas / kapabilitas Pengelola Keuangan segera dilakukan baik berupa sosialisasi maupun bimtek keuangan

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu atau berorientasi pada hasil.

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 100\% - &= \frac{2.110.886.473}{2.110.886.473} \times 100\% \\ &= 100\% - 91.35\% \\ &= 8,65\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sindikator II ini sebesar 8,65% secara teory masih sangat minim dari segi efisiensi.

Indikator 3

Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Kondisi fasilitas pendukung layanan public khususnya di area layanan front office kondisinya sangat memprihatinkan/ kondisi atap gedung yg rubuh
2. Masih rendahnya komitmen pelayanan petugas layanan front office yang melayani langsung masyarakat.

SOLUSI

Upaya Peningkatan kualitas sarana dan prasarana segera dilaksanakan melalui usulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor pada rencana anggaran tahun depan

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022.
2. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu atau berorientasi pada hasil.

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 100\% &= \frac{617.726.500}{614.874.878} \times 100\% \\ &= 100\% - 99,54\% \\ &= 0,1\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di indikator III ini sebesar 0,1% secara teori sangat efisien.

Tabel 3.6
Program/Kegiatan yang mendukung **Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder(IKM)**
tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI			SISA
			K	Rp.	K	Rp.	% Rp.	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP perangkat daerah; opini PKPD; IKM	1396	2,952,888,911	1389	2,750,228,851	93.14	202,660,060
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dok. Perencanaan perangkat daerah yg disusun sesuai standar dan tepat wkt	4	22,067,800	4	22,067,500	100.00	300
	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Jmh Dok. RKA perangkat daerah yg tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2	9,999,800	2	9,999,500	100.00	300
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok. Kinerja yg dihasilkan	1	6,449,600	1	6,449,600	100.00	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jmh rekomendasi hasil monitoring evaluasi kinerja yg tersusun sesuai standar prosedur	1	5,618,400	1	5,618,400	100.00	-
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PNS perangkat daerah yg berkinerja baik	100	2,310,694,611	100	2,110,886,473	91.35	199,808,138
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS	25	2,305,260,511	100	2,105,452,573	91.33	199,807,938
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jmh Dok. LK akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	1	5,434,100	1	5,433,900	100.00	200
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyampaian lap. Aset sesuai standar dan tepat wkt	1	2,400,000	1	2,400,000	100.00	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Aset yang disusun	1	2,400,000	1	2,400,000	100.00	-
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi PD yg tersedia pada PD	204	299,316,400	201	299,164,616	99.95	151,784
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jmh Kom. Instalasi listrik penerangan yg tersedia	7	2,934,500	7	2,929,500	99.83	5,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jmlh peralatan dan perlengkapan kantor yg terpelihara	37	10,374,000	36	10,336,600	99.64	37,400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jmlh makan minum yg tersedia	2	25,000,000	2	24,992,000	99.97	8,000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jmh jenis cetak dan penggandaan yg tersedia	3	24,847,700	3	24,847,300	100.00	400
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jmh jenis bahan bacaan dan perundang-undangan yg tersedia	36	3,960,000	36	3,960,000	100.00	-
	Penyediaan Bahan/ Material	Jmh jenis ATK yang tersedia	38	13,805,200	37	13,704,700	99.27	100,500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jmh lap. Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	81	218,395,000	79	218,394,516	100.00	484
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	1073	194,950,500	1073	194,686,958	99.86	263,542
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jmh surat masuk dan keluar yg dikelola	1000	2,382,900	1000	2,382,496	99.98	404
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jmh jenis kebutuhan komunikasi,air, listrik yg terpenuhi	6	34,407,600	6	34,144,462	99.24	263,138
	Penyediaan Jasa Peralatan & perlengkapan ktr	Jmh jenis perlengkapan gdg ktr yg tersedia	15	25,560,000	15	25,560,000	100.00	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jmh tenaga PTT yg di upah	52	132,600,000	52	132,600,000	100.00	-
E	Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	14	123,459,600	14	121,023,304	98.03	2,436,296
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan	jmh unit randis yg terpelihara; jmh unit kend yg dilengkapi srt izin	12	99,459,600	12	97,023,304	97.55	2,436,296
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gdg ktr yg terpelihara	2	24,000,000	2	24,000,000	100.00	-

Tabel 3.9
Program/Kegiatan yang mendukung **Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik**
perangkat daerah

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% Rp.	SISA
			K	Rp.	K	Rp.		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP perangkat daerah; opini PKPD; IKM						
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Aset yang disusun	1	2,400,000	1	2,400,000	100.00	-
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi PD yg tersedia pada PD	204	299,316,400	201	299,164,616	99.95	151,784
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jmh Kom. Instalasi listrik penerangan yg tersedia	7	2,934,500	7	2,929,500	99.83	5,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jmlh peralatan dan perlengkapan kantor yg terpelihara	37	10,374,000	36	10,336,600	99.64	37,400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jmlh makan minum yg tersedia	2	25,000,000	2	24,992,000	99.97	8,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jmh jenis cetak dan penggandaan yg tersedia	3	24,847,700	3	24,847,300	100.00	400
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jmh jenis bahan bacaan dan perundang-undangan yg tersedia	36	3,960,000	36	3,960,000	100.00	-
	Penyediaan Bahan/ Material	Jmh jenis ATK yang tersedia	38	13,805,200	37	13,704,700	99.27	100,500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jmh lap. Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	81	218,395,000	79	218,394,516	100.00	484
C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	1073	194,950,500	1073	194,686,958	99.86	263,542
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jmh surat masuk dan keluar yg terkelola	1000	2,382,900	1000	2,382,496	99.98	404
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jmh jenis kebutuhan komunikasi,air, listrik yg terpenuhi	6	34,407,600	6	34,144,462	99.24	263,138
	Penyediaan Jasa Peralatan & perlengkapan ktr	Jmh jenis perlengkapan gdg ktr yg tersedia	15	25,560,000	15	25,560,000	100.00	-

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jmh tenaga PTT yg di upah	52	132,600,000	52	132,600,000	100.00	-
D	Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	14	123,459,600	14	121,023,304	98.03	2,436,296
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan	jmh unit randis yg terpelihara; jmh unit kend yg dilengkapi srt izin	12	99,459,600	12	97,023,304	97.55	2,436,296
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gdg ktr yg terpelihara	2	24,000,000	2	24,000,000	100.00	-
JUMLAH				617,726,500		614,874,878	99.5383682	2,851,622

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ke tahun berupaya meningkatkan kapasitas SDM demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat salah satu upaya nyata adalah dengan mengupayakan ketersediaan website OPD sehingga masyarakat umum dapat meng-akses layanan apa saja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama ini. Upaya nyata tersebut dapat kita lihat diantaranya;

- Meningkatkan kualitas tata kelola kantor khususnya ketatausahaan persuratan, penggandaan penyediaan kelengkapan kantor serta sarana pendukung lainnya;
- Meningkatkan kualitas pelayanan public yg berkaitan langsung dengan penyediaan layanan kepada masyarakat / memberikan kemudahan akses serta penyediaan layanan dukungan kepada masyarakat saat berkunjung mengurus administrasi layanan sosial di Dinas Sosial seperti penyediaan ruangan merokok, taman bermain anak serta ruangan laktasi bagi ibu menyusui;
- Mengupayakan Rehabilitasi / Perbaikan sarana kantor yang sudah mulai termakan usia seperti perbaikan plafon, Atap yang bocor serta perbaikan sarana pendingin udara yang sudah tidak berfungsi maksimal serta mengupayakan pengadaan sarana olah data yang mumpuni sehingga Dinas Sosial mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
- Meningkatkan Kompetensi ASN yang tidak berlatar belakang pendidikan Ilmu Sosial dengan mengusulkan yang bersangkutan untuk ikut Diklat Pelayanan Pekerja Sosial yang secara rutin dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Latihan BPKKS Makassar sehingga ASN yang bersangkutan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya di Bidang Sosial.

Pelaksanaan Pengukuran Kepuasan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2022 dilaksanakan secara mandiri dengan menempatkan kotak partisipasi di beberapa ruangan diantaranya adalah pada Ruang lobi Kantor serta ruang

Pelayanan Penginputan Basis Data Terpadu dimana masing-masing kotak partisipasi terinci sebagai berikut;

1. Di Ruang Lobi terdapat 65 kartu partisipasi (54 Responden) yang menyatakan bahwa layanan dilaksanakan dengan sangat baik **96,77 (Sangat baik)**;
2. Pada Pelayanan Basis Data Terpadu Data Kesejahteraan Sosial terdapat 120 Kartu partisipasi dengan tingkat kepuasan layanan mencapai **90,32 (Sangat baik)**.



Serbaneka Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat lingkup Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar



01/05/23

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% Rp.	SISA
			K	Rp.	K	Rp.		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP perangkat daerah; opini PKPD; IKM	1396	2,952,888,911	1389	2,750,228,851	93.14	202,660,060
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dok. Perencanaan perangkat daerah yg disusun sesuai standar dan tepat wkt	4	22,067,800	4	22,067,500	100.00	300
	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Jmh Dok. RKA perangkat daerah yg tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2	9,999,800	2	9,999,500	100.00	300
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok. Kinerja yg dihasilkan	1	6,449,600	1	6,449,600	100.00	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jmh rekomendasi hasil monitoring evaluasi kinerja yg tersusun sesuai standar prosedur	1	5,618,400	1	5,618,400	100.00	-
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PNS perangkat daerah yg berkinerja baik	100	2,310,694,611	100	2,110,886,473	91.35	199,808,138
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS	25	2,305,260,511	100	2,105,452,573	91.33	199,807,938
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jmh Dok. LK akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	1	5,434,100	1	5,433,900	100.00	200
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyampaian lap. Aset sesuai standar dan tepat wkt	1	2,400,000	1	2,400,000	100.00	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Aset yang disusun	1	2,400,000	1	2,400,000	100.00	-
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi PD yg tersedia pada PD	204	299,316,400	201	299,164,616	99.95	151,784
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jmh Kom. Instalasi listrik penerangan yg tersedia	7	2,934,500	7	2,929,500	99.83	5,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jmlh peralatan dan perlengkapan kantor yg terpelihara	37	10,374,000	36	10,336,600	99.64	37,400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jmlh makan minum yg tersedia	2	25,000,000	2	24,992,000	99.97	8,000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jmh jenis cetak dan penggandaan yg tersedia	3	24,847,700	3	24,847,300	100.00	400
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jmh jenis bahan bacaan dan perundang-undangan yg tersedia	36	3,960,000	36	3,960,000	100.00	-
	Penyediaan Bahan/ Material	Jmh jenis ATK yang tersedia	38	13,805,200	37	13,704,700	99.27	100,500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jmh lap. Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	81	218,395,000	79	218,394,516	100.00	484
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	1073	194,950,500	1073	194,686,958	99.86	263,542
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jmh surat masuk dan keluar yg terkelola	1000	2,382,900	1000	2,382,496	99.98	404
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jmh jenis kebutuhan komunikasi,air, listrik yg terpenuhi	6	34,407,600	6	34,144,462	99.24	263,138
	Penyediaan Jasa Peralatan & perlengkapan ktr	Jmh jenis perlengkapan gdg ktr yg tersedia	15	25,560,000	15	25,560,000	100.00	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jmh tenaga PTT yg di upah	52	132,600,000	52	132,600,000	100.00	-
E	Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	14	123,459,600	14	121,023,304	98.03	2,436,296
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan	jmh unit randis yg terpelihara; jmh unit kend yg dilengkapi srt izin	12	99,459,600	12	97,023,304	97.55	2,436,296
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gdg ktr yg terpelihara	2	24,000,000	2	24,000,000	100.00	-
F	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Miskin Potensial yg Diberdayakan	694	717,779,000	84	217,611,900	30.32	500,167,100
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	jmh KK KAT yg mendapat fasilitas pemberdayaan sosial		15,276,600	84	15,241,400	99.77	35,200
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jmlh KK KAT yg mendptkn fasilitas dayasos	84	15,276,600	84	15,241,400	99.77	35,200
	Pengembangan Potensi Sumber Kesos Daerah Kab/Kota	jumlah Masy. miskin potensial yg diberdayakan		702,502,400	110	202,370,500	28.81	500,131,900
	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesos klg kewenangan kab/kota	Jmh KUBE yg dibina & Jlmh PSKS yg diberi ktrmpln	610	702,502,400	110	202,370,500	28.81	500,131,900

g	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yg ditangani dlm pelayanan rehsos	45	186,267,800	45	182,492,800	97.97	3,775,000
	Rehsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng di luar panti sosial	Jmlh PMKS luar panti yg ditangani dlm pelayanan sosial		130,691,300	74	130,669,400	99.98	21,900
	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS luar panti yg mendptkn peny. Permakanan	70	130,691,300	70	130,669,400	99.983243	21,900
	Rehsos dasar penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Jmlh PMKS yg dilayani		55,576,500	15	51,823,400	93.2469659	3,753,100
	Pemberian Bimsos kepada kpd kel. penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Jumlah ODGJ/WRSE/terlantar yg ditangani	15	55,576,500	15	51,823,400	93.2469659	3,753,100
h	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial	87814	3,939,566,000	70520	3,938,253,900	99.9666943	1,312,100
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jmh Data KK dgn tk kesos valid		3,939,566,000	70520	3,938,253,900	99.9666943	1,312,100
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jmlh data KM yg diverifikasi;jmlh KM penerima bantuan yg diverifikasi;jmlh KPM PKH yg diverifikasi;Jmlh RTLH yg direhab		3,939,566,000	70520	3,938,253,900	99.9666943	1,312,100
i	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yg ditangani	150	89,193,400	150	89,073,400	99.8654609	120,000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jmlh paket banlog yg disediakan		89,193,400	150	89,073,400	99.8654609	120,000
	Penyediaan Makanan	Jmlh paket bansos yg disalurkan		89,193,400	150	89,073,400	99.8654609	120,000
j	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase lembaga sosial pemberi layanan usaha kesos	2	10,996,900	2	10,996,900	100	-
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota	Jmh TMP yg dikelola		10,996,900	2	10,996,900	100	-
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota	Jmh TMP yg dikelola	2	10,996,900	2	10,996,900	100	-
JUMLAH				7,896,692,011		7,188,657,751	91.0337866	708,034,260

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI (%)	REALISASI
		2022	2022		2021
5	BELANJA	7,896,692,011.00	7,188,657,751.00	91.03	3,535,925,776.00
5.1	BELANJA OPERASI	7,867,629,011.00	7,159,594,751.00	91.00	3,512,133,576.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,305,260,511.00	2,105,452,573.00	91.33	2,203,126,869.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,453,042,300.00	1,444,816,078.00	99.43	1,309,006,707.00
5.1.05	Belanja Hibah	550,000,000.00	50,000,000.00	9.09	89,010,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3,559,326,200.00	3,559,326,100.00	100.00	0.00
5.2	BELANJA MODAL	29,063,000.00	29,063,000.00	0.00	23,792,200.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29,063,000.00	29,063,000.00	100.00	23,792,200.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7,896,692,011.00)	(7,188,657,751.00)	91.03	(3,535,925,776.00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7,896,692,011.00)	(7,188,657,751.00)	91.03	(3,535,925,776.00)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tahun 2022 merupakan tahun yang memberikan tantangan tersendiri bagi Dinas Sosial dalam pencapaian target kinerja tahunan, maupun pencapaian target kinerja 5 tahunan. Keterbatasan anggaran menjadi persoalan klasik dan lagi lagi berulang, hal ini tak mampu dihindari mengingat Pelaksanaan Program/ Kegiatan apapun itu tentu akan mampu diukur keberhasilannya jika ditopang ketersediaan anggaran yg memadai. Dinas Sosial sebagai peng-ampu urusan Sosial dibebani target capaian SPM yang mampu setidaknya memberikan Pelayanan dan Penanganan Maksimal kepada Kelompok Rentan Lanjut Usia, Anak Luar Panti, Disabilitas serta Masyarakat Korban Bencana Alam Maupun Sosial dinilai belum berada di tingkat yang seharusnya. Isu strategis seperti capaian SPM, Penanganan Stunting serta Percepatan Pengurangan Angka Kemiskinan Ekstrem hingga tahu ke-4 pelaksanaan RPJMD belum juga mampu memberikan dampak secara signifikan. Dan harapannya semoga di tahun yg akan datang Prioritas Anggaran lebih berpihak kepada isu-isu strategis yg dimaksud.

B. Langkah Perbaikan kedepan

Berdasarkan pada pencapaian diatas, masalah prioritas yang memerlukan tindak lanjut segera adalah;

1. Pencapaian Target SPM belum maksimal

Rencana Tindak Lanjut :

Dukungan anggaran yg memadai diharapkan mampu mendukung percepatan pencapaian target SPM, khususnya pada penanganan Disabilitas Terlantar, penyediaan sarana alat bantu sangat-sangat diperlukan hal ini diupayakan dapat terakomodir melalui dana pusat APBN maupun dana dekonsentrasi provinsi serta melalui peran serta pihak swasta seperti program Corporate Social Responsibility (CSR).

2. Masih rendahnya capaian di Program Pemberdayaan Sosial

Sama hal nya denga tahun sebelumnya (tahun 2021) tingkat capaian di Program ini sangat rendah akibat sangat terbatasnya Pagu yg dialokasikan untuk Program ini. Hal ini tidak terlepas dari catatan bahwa Program tersebut bukan menjadi Prioritas utama mengingat program ini tidak menjadi capaian dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditambah lagi belum sinkronnya data kemiskinan yang menjadi sasaran prioritas yang akan ditetapkan menjadi Calon Penerima Bantuan yang sifatnya berupa Bantuan Sosial maupun Bantuan yang sifatnya Stimulan.

Rencana Tindak Lanjut :

Penetapan Data Kemiskinan / Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada ditingkat Desa / Kelurahan yang kemudian ditetapkan sebagai prioritas penerima bantuan sosial.



LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL

Jl. H. Andi Depu No. 147 Polewali Mandar 91313
 Telepon. 0428-21025 Faks. 0428-22948
 www.dinsos.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **H. AZWAR JASIN, S.Sos, M.Si**
 Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**
 Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 09 Maret 2022

Pihak Pertama,

BUPATI POLEWALI MANDAR

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

KEPALA DINAS SOSIAL

H. AZWAR JASIN, S.Sos, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19730711 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	40,29%	44.78
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial	39,08%	33,00%
4	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensi	Persentase masyarakat miskin potensi yang memiliki ketahanan sosial	15,00%	21,00%
5	Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial	117,49%	71,00%
6	Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	25%	100%
7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100,00%	100,00%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2,927,495,674	APBD
2	Pemberdayaan Sosial	Rp 146,379,000	APBD
3	Rehabilitasi Sosial	Rp 140,767,800	APBD
4	Perlindungan dan Jaminan	Rp 3,939,566,200	APBD
5	Penanganan Bencana	Rp 89,193,400	APBD
6	Pengelolaan Taman Makam	Rp 10,996,900	APBD
JUMLAH		Rp 7,254,398,974	APBD

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,



H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Polewali, 09 Maret 2022

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS SOSIAL,



H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19730711 199203 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 1.06		Sosial			
Unit Organisasi : 1.06.01		DINAS SOSIAL			
Sub. Unit Organisasi : 1.06.01.01		DINAS SOSIAL			
NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI
		2022	2022		2021
5	BELANJA	7,896,692,011.00	7,188,657,751.00	91.03	3,535,925,776.00
5.1	BELANJA OPERASI	7,867,629,011.00	7,159,594,751.00	91.00	3,512,133,576.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,305,260,511.00	2,105,452,573.00	91.33	2,203,126,869.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,453,042,300.00	1,444,816,078.00	99.43	1,309,006,707.00
5.1.05	Belanja Hibah	550,000,000.00	50,000,000.00	9.09	89,010,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3,559,326,200.00	3,559,326,100.00	100.00	0.00
5.2	BELANJA MODAL	29,063,000.00	29,063,000.00	0.00	23,792,200.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29,063,000.00	29,063,000.00	100.00	23,792,200.00
SURPLUS / (DEFISIT)		(7,896,692,011.00)	(7,188,657,751.00)	91.03	(3,535,925,776.00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(7,896,692,011.00)	(7,188,657,751.00)	91.03	(3,535,925,776.00)